



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Badan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 6 Juni 2018.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr, Ir, Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI/Ir.H.A.R. Sutan Adil Hendra,MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan RKA K/L & RKP K/L Tahun 2019.
Hadir	: 30 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Triawan Munaf/Kepala Bekraf RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **14.40** WIB oleh **Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua** Komisi X DPR RI dan dilanjutkan oleh **Ir. H.A.R Sutan Adil Hendra, MM/ Wakil** Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bekraf RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI menyampaikan antara lain:

1. Bekraf RI mendapatkan pagu indikatif RAPBN TA 2019 sebesar **Rp706.167.673.000,-** (*Tujuh ratus enam milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1.	Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan	105.604.800.000
2.	Deputi Akses Permodalan	71.383.000.000
3.	Deputi Infrastruktur	142.406.700.000
4.	Deputi Pemasaran	127.189.200.000
5.	Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi	71.293.700.000
6.	Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah	59.732.732.000
7.	Sestama	128.557.541.000

2. Bekraf RI berpandangan bahwa pagu indikatif pada TA 2019 sebesar **Rp706.167.673.000,-** (*Tujuh ratus enam milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan APBN TA 2018 sebesar **Rp746.158.140.000,-** (*Tujuh ratus empat puluh enam milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah*) akan berpengaruh terhadap output/hasil kegiatan. Oleh karena itu, Bekraf RI mengusulkan tambahan anggaran sejumlah **Rp270 M**, yang digunakan untuk:
 - a. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
3. Bekraf RI telah merumuskan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan nilai tambah jasa produktif
 - b. Penempatan peningkatan keahlian tenaga kerja
 - c. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas
4. Bekraf RI telah memiliki rencana perbaikan pengelolaan pada Tahun 2019, dengan prakarsa pengelolaan sebagai berikut:
 - a. Mengimplemetasikan *e-Government* secara penuh melalui papan Bekraf.
 - b. Membentuk Pusat Data dan Informasi sebagai unit eselon dua di Deputi I.
 - c. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

B. Sikap dan pandangan Komisi X DPR RI

1. Komisi X DPR RI telah mengetahui bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 perihal Pagu Indikatif K/L Tahun 2019, Pagu Indikatif Badan Ekonomi Kreatif RI sejumlah **Rp706.167.673.000,-** (*Tujuh ratus enam milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
2. Dalam pembahasan RKP dan RKA Bekraf RI ke depan, Bekraf RI perlu:
 - a. menyajikan basis data yang digunakan, rujukan, target dan sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA TA 2019, serta menyampaikan juga peta data ekonomi kreatif per-provinsi dan per-kabupaten/kota sampai tahun 2018, khususnya yang terkait dengan capaian program unggulan dan program prioritas.
 - b. Menyajikan *review* capaian program dan kegiatan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, sebagai bahan rujukan penyusunan RKP dan RKA Bekraf RI.
3. Berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU MD3, Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan APBN TA 2018, untuk menjadi salah satu bahan rujukan pembahasan RKP dan RKA Bekraf RI TA 2019.
4. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap bahan yang disampaikan Bekraf RI hari ini, setelah ada perbaikan usulan tambahan langsung sejumlah 270 M yang dimasukkan dalam anggaran masing-masing

deputi, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKP dan RKA Bekraf RI TA 2019.

C. Lain-Lain

1. Komisi X DPR RI dan Kepala Bekraf RI sepakat akan mengagendakan Pembahasan RKP-K/L dan RKA-K/L Tahun 2019 pada tanggal 2 s/d 4 Juli 2018 (*tentatif*), dengan agenda penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, organisasi dan program kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Banggar pada Masa Sidang V Tahun 2017-2018, dengan meminta Bekraf RI untuk melaksanakan FGD terlebih dahulu dengan mengundang Komisi X DPR RI.
2. Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk menyerahkan penjelasan atau jawaban atas seluruh pertanyaan, masukan dan tanggapan anggota Komisi X DPR RI secara tertulis paling lambat tanggal 26 Juni 2018

II. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.45 WIB

KEPALA BEKRAF RI



TRIAWAN MUNAF

KETUA RAPAT, ²¹



DR.IR. DJOKO UJIANTO, M.M.